



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

2022

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN KEUANGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2022. Laporan ini disusun sebagai program kerja Badan Keuangan dalam Tahun 2022.

Rancangan Awal Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 mempedomani Evaluasi terhadap capaian Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2016-2021, serta juga mempedomani Rancangan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang saat ini sedang disusun bersama-sama dengan SKPD terkait.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2022 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika penulisan Rencana Kerja.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun 2020.....	6
	2.2 Identifikasi Faktor Penentu Keberhasilan..	21
	2.3 Akuntabilitas Keuangan	22
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional....	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan.....	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
BAB V	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2020.....	9
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020.....	23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	24
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun
 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2022 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja SKPD

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi terhadap capaian Renstra Tahun 2016-2021 serta Rancangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja – SKPD mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, karena Renja- SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan Badan keuangan Tahun Anggaran 2022 yang lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 akan berakhir pada Tahun 2021, sedangkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026 baru akan disusun setelah Kepala daerah terpilih dilantik, maka

penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2022 mempedomani sebagai berikut :

1. Berpedoman pada evaluasi capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
2. Berpedoman pada Rancangan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka penetapan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan tahun 2022 mengacu pada kode dan nama program kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sedangkan substansi yang didusun dalam Renja Tahun 2022 akan diintegrasikan kedalam Renstra SKPD Tahun 2022-2026 yang akan mulai disusun setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum penyusunan Renja- SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

- diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2019;
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
 15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Renstra Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya ;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program ;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;
- e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2022;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 ;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Badan Keuangan Tahun 2020

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020

Badan Keuangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Perwako Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Badan Keuangan dengan tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di bidang penunjang urusan pemerintah bidang keuangan”.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu pada bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2020 pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengacu kepada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016–2021, Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2016-2021, RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan.

2.1.1. Evaluasi Capaian Renja Badan Keuangan Tahun 2020.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Perda Perubahan APBD tersebut maka Badan Keuangan Mendapat anggaran Belanja Langsung Rp13.745.608.961,00 yang terdiri dari 6 Program 44 kegiatan. Agar semua kegiatan ini berjalan dengan lancar maka dilakukan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan dana program dan kegiatan, dimana Alokasi APBD di tahun 2020 sebagai Berikut :

A. Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8.540.093.908,00.

B. Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp13.745.608.961,00 yang terdiri dari 6 program 44 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan sebanyak 15 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.997.384.320,00 terdiri dari 3 Program yaitu :
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp7.871.884.320,00.
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00.
 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp25.500.000,00
- ✓ Belanja Langsung Urusan sebanyak 29 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp5.748.224.730,00. Terdiri dari 3 program yaitu :
 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp2.516.174.505,00.
 2. Program Peningkatan Penerimaan PAD dengan pagu anggaran sebesar Rp1.276.002.514,00
 3. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp1.956.047.622,00

C. Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.794.770.150,00 atau 85,81% yang terdiri dari:

- ✓ Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan sebanyak 15 Kegiatan dengan Realisasi anggaran sebesar Rp7.060.679.741,00 (88,29%) terdiri dari 3 Program yaitu:
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran sebesar Rp7021.645.741,00 (89,20%)
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.552.000,00 (13,55%)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.500.000,00 (100%)
- ✓ Belanja Langsung Urusan sebanyak 29 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.734.072.409,00(82,36%) terdiri dari 3 program yaitu :
 1. Program Peningkatan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.187.222.681,00 (86,93%)
 2. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp1.397.593.663,00 (71,45%)
 - 3 Program Peningkatan Penerimaan PAD dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.149.256.065,00 (90,07%)

D. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp8.276.751.233,00 (96,92%)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Keuangan untuk Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
EVALUASI RENCANA KERJA
TAHUN 2020

Instansi: Badan Keuangan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BADAN KEUANGAN					13.745.608.961,00	11.795.124.790,00	85,81
	Keuangan					5.748.224.641,00	4.734.427.049,00	82,36
4.04 . 4.04.01 .02 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD Kota Bukittinggi	WTP			2.516.174.505,00	2.187.577.321,00	86,94
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 20	Penyusunan APBD Kota Bukittinggi	Perda APBD yang dihasilkan	1 Perda	1 Perda	100%	425.990.000,00	380.237.425,00	89,26
		Perwako APBD yang dihasilkan	1 Perwako	1 Perwako	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 21	Penyusunan Perubahan APBD Kota Bukittinggi	Perda Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perda	1 Perda	100%	305.940.000,00	294.889.615,00	96,39
		Perwako Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Perwako	1 Perwako	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 22	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang pergeseran penjabaran APBD	Dokumen Perwako pergeseran APBD yang dihasilkan	1 Perwako	1 Perwako	100%	30.000.000,00	29.802.900,00	99,34

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 23	Pengendalian hibah dan bansos	Jumlah SKPD Monev pengelola Hibah dan Bansos	14 SKPD	14 SKPD	100%	69.648.000,00	61.954.320,00	88,95
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 24	Penyusunan dan pengesahan DPA dan DPPA	Jumlah DPA yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan APBD	1450 DPA	0	0%	284.150.000,00	241.213.900,00	84,89
		Jumlah DPPA SKPD yang ditetapkan dan disahkan sesuai dengan P-APBD	1150 DPPA	1150 DPPA	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 25	Penyusunan perwako tentang Standar Biaya	Dokumen Perwako Standar Biaya	1 Perwako	1 Perwako	100%	184.438.750,00	179.655.327,00	97,41
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 26	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perda	1 Perda	100%	375.046.500,00	317.259.025,00	84,59
		Perwako Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dihasilkan	1 Perwako	1 Perwako	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 27	Pelaksanaan dan peningkatan akuntansi berbasis akrual	Jumlah dokumen LK yang disusun sesuai SAP	6 laporan	6 laporan	100%	83.436.250,00	67.792.025,00	81,25

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 28	Penyediaan dan penyampaian informasi keuangan daerah	Jumlah informasi keuangan daerah yang disusun	12 informasi	12 informasi	100%	81.235.922,00	79.340.822,00	97,67
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 29	Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis enam bulan berikutnya	Laporan semester 1 tersusun	1 laporan	1 laporan	100%	33.616.000,00	33.616.000,00	100,00
		prognosis 6 bulan berikutnya tersusun	1 laporan	1 laporan	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 30	Asistensi rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	Berita acara rekonsiliasi keuangan dan aset daerah	4 Berita Acara			30.870.000,00	29.229.500,00	94,69
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 31	Pengendalian kas daerah	Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda	7 transaksi	7 transaksi	100%	44.376.000,00	38.834.885,00	87,51
		Jumlah transaksi kas daerah deposito	5 transaksi	5 transaksi	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 32	Pemrosesan gaji ASN	Jumlah daftar gaji yang diterbitkan	600 daftar gaji	600 daftar gaji	100%	32.000.000,00	30.731.600,00	96,04
		Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	168 penyetoran PFK	168 penyetoran PFK	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17	Pengendalian belanja daerah	Dokumen SP2DSKPD selain gaji	388 SP2D	2000 SP2D	515%	283.730.133,00	264.549.372,00	93,24

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
. 33		Laporan dana transfer disampaikan	9 kali laporan	9 kali laporan	100%			
		SK pngelolaan keuangan yang diterbitkan	12 SK	12 SK	100%			
		SPJ terverifikasi	348 SPJ terverifikasi	348 SPJ terverifikasi	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 34	Penyediaan dan updating Simda Keuangan	Pengelolaan keuangan yang terintegrasi	4 bidang pengelolaa n	4 bidang pengelola an	100%	89.164.000,00	15.532.200,00	17,42
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 35	Pengendalian Penerimaan Keuangan Daerah	Laporan pengendalian penerimaan	12 laporan	12 laporan	100%	68.679.500,00	33.646.905,00	48,99
		jumlah kasus yang dibedah dalam sidang TP-TGR	1 kasus	-				
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 36	Penyusunan buku standar harga barang dan Jasa Kebutuhan Kota Bukittinggi	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	1 Buku	1 Buku	100%	18.853.450,00	18.016.200,00	95,56
4.04 . 4.04.01 .02 . 17 . 37	Kajian Penyertaan Modal	Kajian penyertaan modal yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	75.000.000,00	71.275.300,00	95,03

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 19	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase objek BMD yang dimanfaatkan, Persentase akurasi data BMD	80%			1.956.047.622,00	1.397.593.663,00	71,45
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 10	Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah BMD yang dipindahtanggankan	2 jenis	2 jenis	100%	259.849.711,00	110.879.363,00	42,67
		BMD yang diawasi	1 laporan	1 laporan	100%			
		BMD yang dapat dikendalikan	1 laporan	1 laporan	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 12	Penyusunan rencana kebutuhan barang	Jumlah dokumen RKBMD	1 buku	1 buku	100%	6.180.000,00	2.810.000,00	45,47
		Jumlah dokumen RKPBM	2 buku	2 buku	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 13	Penatausahaan BMD	Jumlah laporan BMD tahunan	4 laporan	4 laporan	100%	1.606.697.911,00	1.241.504.310,00	77,27
		Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang	2 buku	2 buku	100%			
		Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya	145 orang					
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 14	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	28 laporan	28 laporan	100%			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 15	Pengalihan bukti kepemilikan tanah Pemko	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	10 sertifikat			29.720.500,00	6.747.440,00	22,70
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 16	Penggunaan BMD	Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah	29 penetapan status	29 penetapan status	100%	24.346.000,00	17.234.850,00	70,79
		Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah	29 status pengalihan	29 status pengalihan	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 19 . 17	Pemanfaatan BMD	Jumlah objek pemanfaatann aset	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai	100%	29.253.500,00	18.417.700,00	62,96
		Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	76 HGB diatas HPL	76 HGB diatas HPL	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 18	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rasio PAD terhadap APBD	10%			1.276.002.514,00	1.149.256.065,00	90,07
4.04 . 4.04.01 .02 . 18 . 04	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Peningkatan penerimaan PAD	10%			355.361.592,00	322.519.971,00	90,76
4.04 . 4.04.01 .02 . 18 . 09	Penyusunan dokumen pajak daerah	Dokumen pajak daerah yang disusun	9 jenis pajak	9 jenis pajak	100%	171.440.922,00	161.770.122,00	94,36

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 18 . 10	Peningkatan,Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah	Laporan pengawasan	1 laporan	1 laporan	100%	700.000.000,00	624.324.172,00	89,19
		Capaian target penerimaan pajak	100%					
		Capaian target penerimaan retribusi	100%					
		Jumlah piutang yang valid	Rp120 juta					
4.04 . 4.04.01 .02 . 18 . 11	Peningkatan dan pengembangan Sistim Informasi Pendapatan Daerah (SIPD)	Jumlah data pajak online yang terintegasi	10 data online	17 data online	170%	49.200.000,00	40.641.800,00	82,61
	Program Penunjang					7.997.384.320,00	7.060.697.741,00	88,29
4.04 . 4.04.01 .02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas pelayanan internal	80%			7.871.884.320,00	7.021.645.741,00	89,20
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai 3000 tersedia	200 lembar			3.058.000,00	3.036.000,00	99,28
		Materai 6000 tersedia	300 lembar					
		Paket pengiriman dan benda pos lainnya tersedia	1 Ls					

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening listrik terbayarkan	36 rekening	36 rekening	100%	132.000.000,00	116.804.732,00	88,49
		Rekening telpon terbayarkan	24 rekening	24 rekening	100%			
		Rekening air terbayarkan	12 rekening	12 rekening	100%			
		Rekening internet/fax	12 rekening	12 rekening	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/operasional	Servis dan suku cadang kendaraan roda 4 tersedia	8 unit	8 unit	100%	214.000.000,00	173.399.944,00	81,03
		Servis dan suku cadang kendaraan roda 2 tersedia	32 unit	32 unit	100%			
		Pajak kendaraan terbayarkan	40 unit	40 unit	100%			
		BBM kendaraan eselon 2,3,4 dan staf lapangan disediakan	32 orang	32 orang	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Pengelola keuangan yang dibayarkan honorarnya	9 komponen pengelola	9 komponen pengelola	100%	6.523.000.000,00	5.813.087.500,00	89,12

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia	30 jenis	30 jenis	100%	255.000.000,00	245.587.950,00	96,31
		Jasa cleaning service tersedia	5 orang	5 orang	100%			
		Retribusi sampah terbayarkan ;	12 tagihan	12 tagihan	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	46 jenis;	46 jenis;	100%	52.478.200,00	51.951.700,00	99,00
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak	9 jenis	9 jenis	100%	205.595.070,00	162.835.320,00	79,20
		Barang cetakan keperluan kantor tercetak	5 Jenis	5 Jenis	100%			
		Fotocopy terbayarkan	73.423 lembar					
		Penggandaan terbayarkan	15 exemplar					
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik tersedia	11 jenis	11 jenis	100%	3.498.050,00	3.498.000,00	100,00
		Penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis	3 jenis	100%			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 17	Penyediaan makan minum kantor	Makan dan minum rapat	180 bungkus/kotak			40.000.000,00	24.605.800,00	61,51
		Makan dan minum lembur	300 bungkus/kotak					
		Makan minum pendampingan pemeriksaan	60 hari	40 hari	67%			
		Minum tamu	3 jenis	3 jenis	100%			
		Manakan ringan ruang pimpinan	3 jenis	3 jenis	100%			
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah	perjalanan dinas dalam daerah diikuti	20 hari			205.500.000,00	191.755.795,00	93,31
		Perjalanan dinas luar daerah diikuti	36 hari					
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 19	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan lainnya terpelihara	10 unit	10 unit	100%	24.000.000,00	21.428.000,00	89,28
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Pengadaan pengamanan kantor	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 orang	5 orang	100%	199.755.000,00	199.755.000,00	100,00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA FISIK			CAPAIAN KINERJA ANGGARAN		
			TARGET FISIK	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.04 . 4.04.01 .02 . 01 . 22	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah Pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa	9 orang	9 orang	100%	14.000.000,00	13.900.000,00	99,29
4.04 . 4.04.01 .02 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana terpenuhi	70%	70%	100%	100.000.000,00	13.552.000,00	13,55
4.04 . 4.04.01 .02 . 03 . 02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%	100.000.000,00	13.552.000,00	13,55
4.04 . 4.04.01 .02 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur Meningkat	90 Orang	90 Orang	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00
4.04 . 4.04.01 .02 . 03 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pakaian dinas tersedia	90 stel	90 stel	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00

Dari tabel diatas capaian kinerja fisik terhadap program dan kegiatan hampir mencapai 100%, namun secara keuangan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi secara maksimal. Adapun program dan kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 85% adalah sebagai berikut:

- I. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Kegiatan Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA, alokasi anggaran sebesar Rp284.150.000,00, realisasi sebesar Rp241.213.900,00 atau sebesar 84,89%, hal ini disebabkan oleh honorarium penyusunan dan pengesahan DPA TA 2021 tidak dapat dibayarkan karena APBD TA 2021 baru ditetapkan tanggal 30 Desember 2020
 2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Akuntansi Berbasis Akrual, alokasi anggaran sebesar Rp83.436.250,00, realisasi sebesar Rp67.792.025,00 atau sebesar 81,25%, realisasi tidak maksimal disebabkan belanja akomodasi tidak direalisasikan karena narasumber yang diundang karena suatu dan lain hal tidak bias menginap di Bukittinggi
 3. Kegiatan Penyediaan dan Updating Simda, alokasi anggaran sebesar Rp89.164.000,00, realisasi sebesar Rp15.532.200,00 atau sebesar 17,42%, hal ini disebabkan karena pendampingan bagi SKPD dan updating aplikasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan terkendala covid 19
 4. Kegiatan Pengendalian Penerimaan keuangan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp68.679.500,00, realisasi sebesar Rp33.646.905,00 atau sebesar 48,99%, hal ini disebabkan salah satu indikator kegiatan jumlah kasus yang dibahas dalam siding TP-TGR tidak dapat dilaksanakan karena terkendala covid 19
- II. Program Peningkatan Penerimaan PAD
 1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD), alokasi anggaran sebesar Rp49.200.000,00. Realisasi Rp40.641.800,00 (82,61), realisasi tidak maksimal disebabkan adanya efisiensi pada belanja pemeliharaan instalasi dan jaringan komputer

III. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

1. Kegiatan Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian BMD, alokasi anggaran sebesar Rp259.849.711,00, realisasi sebesar Rp110.879.363,00 atau sebesar 42,67%, disebabkan karena penjualan kendaraan dan BMD dengan kondisi rusak berat masih banyak yang belum ditindaklanjuti serta tidak ada usulan dari SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, alokasi anggaran sebesar Rp6.180.000,00, realisasi sebesar Rp2.810.000,00 atau sebesar 45,47%, disebabkan belum dapat dilakukannya pembahasan RKBMD dengan SKPD karena keterbatasan waktu
3. Kegiatan Penatausahaan BMD, alokasi anggaran sebesar Rp1.606.679.911,00, realisasi sebesar Rp1.241.504.310,00 atau sebesar 77,27%, Realisasi fisik mencapai 100%, realisasi keuangan tidak maksimal karena adanya kebijakan pemotongan honor SKPD yang terlambat menyampaikan laporan
4. Kegiatan Pengalihan Bukti Kepemilikan Tanah Pemko, alokasi anggaran sebesar Rp29.720.500,00, realisasi sebesar Rp6.747.440,00 atau sebesar 22,70%, target fisik telah direalisasikan lebih dari 100%, namun keuangan tidak terealisasi secara maksimal karena dokumen peralihan tidak lengkap dan kesulitan meminta dokumen P3D 2000 kepada Pemprov dan pusat
5. Kegiatan Penggunaan BMD alokasi anggaran sebesar Rp24.346.000,00, realisasi sebesar Rp17.234.850,00 atau sebesar 70,79%, realisasi kegiatan tidak maksimal karena kurangnya koordinasi dengan SKPD, kondisi covid 19 dan kebijakan WFH menyebabkan koordinasi lebih banyak dilakukan secara virtual
6. Kegiatan Pemanfaatan BMD, alokasi anggaran sebesar Rp29.253.500,00, realisasi sebesar Rp18.417.700,00 atau sebesar 62,96%, kegiatan tidak terlaksananya penilaian untuk pemanfaatan BMD (sewa) oleh KPKNL dikarenakan tidak adanya jadwal dari KPKNL

2.2 Identifikasi Faktor Penentu Keberhasilan

Berdasarkan rumusan dan penetapan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan, dalam proses pengembangan perencanaan strategis lebih lanjut

perlu diungkapkan dengan jelas beberapa faktor penentu keberhasilan (*Critical success factor*) yang akan mengidentifikasi beberapa unsur strategis dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

a). Kelemahan (Weakness)

- Terbatasnya sarana dan prasarana .
- Terbatasnya SDM aparatur terutama dibidang informasi teknologi.

b). Kekuatan (Strength)

- Tersedianya potensi sumber penerimaan yang belum tergali secara optimal.
- Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerimaan daerah.
- Tersedianya data subjek dan objek pajak/retribusi daerah serta penerimaan lainnya.

c). Peluang (Opportunity)

- Adanya kepedulian dan peran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- Adanya hubungan mitra kerja.
- Adanya rencana penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

d). Ancaman (Threats)

- Situasi politik dan keamanan nasional yang relatif kurang kokoh dan mudah goyah.

2.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah

Akuntabilitas keuangan juga merupakan media pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan oleh organisasi

tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah juga untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Keuangan yang yang dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan pada tahun 2020 ini dapat dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel2.2.
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2020

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Keuangan	%
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	63.871.929.024,00	75.060.605.035,30	117,52
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.871.929.024,00	75.060.605.035,30	117,52
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	75.000.000,00	65.627.250,00	87,5
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.283.324.528,00	23.718.948.016,80	230,65
2	BELANJA	31.720.191.958,00	27.352.125.510,00	86,23
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.796.272.141,00	12.852.509.032,00	93,16
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	13.796.272.141,00	12.852.509.032,00	93,16
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	17.923.919.817,00	14.499.616.478,00	80,9
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.694.225.000,00	8.651.627.750,00	80,9
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.729.330.717,00	5.437.830.601,00	80,81
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	6.729.330.717,00	5.437.830.601,00	80,81
2 . 2 . 3	Belanja Modal	500.364.100,00	410.158.127,00	81,97
	SURPLUS / (DEFISIT)	-95.592.120.982,00	-102.412.730.545,30	107,14
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	32.151.737.066,00	47.708.479.525,30	148,39

BAB III

TUJUAN, SASARAN BADAN KEUANGAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa.

Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Kepastian dan Penegakan Hukum	APBN	
2.	Keamanan dan Ketertiban	APBN	
3.	Politik dan Demokrasi	APBN	
4.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka dalam menyusun program kegiatannya Badan Keuangan mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan keuangan

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka tujuan Badan Keuangan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam Badan Keuangan Kota Bukittinggi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yaitu “Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah”.

Tujuan Badan Keuangan Kota Bukittinggi adalah tujuan yang menggambarkan fungsi pengelolaan keuangan Badan Keuangan Kota Bukittinggi, sebagai ujung tombak pengelolaan keuangan di Kota Bukittinggi.

3.2.1 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang professional, akuntabel dan transparan;
2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Badan Keuangan Kota Bukittinggi, yang disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang professional, akuntabel dan transparan	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	8%	9%	10%	11%	12%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program sebagai bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini Badan Keuangan) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD / Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, meliputi :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan Penerimaan PAD
5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 direncanakan kebutuhan

dana/pagu indikatif sebesar Rp34.134.199.095,00 Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Keuangan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Adapun penyajiannya sebagaimana dibawah ini:

TABEL.4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	KEUANGAN				34.138.199.095,00		-		41.816.898.000,00
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kualitas Perencanaan Penganggaran	BK	100%	15.574.311.572,00	APBD	-	100%	18.784.515.600,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perencanaan penganggaran sesuai aturan	BK	100%	1.669.101.000,00	APBD	-	100%	2.002.921.200,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang dihasilkan	BK	2 Buku	354.290.000,00	APBD	-	2 Buku	425.148.000,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	BK	2 Buku	305.960.000,00	APBD	-	2 Buku	367.152.000,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	DPA dan DPPA SKPD diverifikasi	BK	28 SKPD	77.781.000,00	APBD	-	28 SKPD	93.337.200,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1. Perda APBD 2. Perwako APBD	BK	1 Perda 1 Perwako	391.270.000,00	APBD	-	1 Perda 1 Perwako	469.524.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Perda PAPBD 2. Perwako PAPBD	BK	1 Perda 1 Perwako	366.800.000,00	APBD	-	1 Perda 1 Perwako	440.160.000,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran disusun	BK	1 Dokumen	173.000.000,00	APBD	-	1 Dokumen	207.600.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan	BK	100%	1.116.740.164,00	APBD	-	100%	1.350.576.000,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SPP, SPM gaji dan pengesahan SPJ gaji yang diteliti	BK	600 Dokumen	65.000.000,00	APBD	-	600 Dokumen	78.000.000,00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	SPD yang diterbitkan	BK	4 SPD	45.000.000,00	APBD	-	4 SPD	54.000.000,00
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan pembiayaan daerah	BK	1 Laporan	40.000.000,00	APBD	-	1 Laporan	48.000.000,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan dana transfer disampaikan	BK	9 Laporan	271.469.204,00	APBD	-	9 Laporan	330.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah perhitungan dan penyetoran potongan fihak ketiga (PFK) dan iuran pemda	BK	168 penyetoran PFK	63.291.400,00	APBD	-	168 penyetoran PFK	78.000.000,00
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Jumlah transaksi kas daerah berupa pengeluaran kasda 2. Jumlah transaksi kas daerah deposito	BK	7 Transaksi 5 Transaksi	68.184.500,00	APBD	-	7 Transaksi 5 Transaksi	84.000.000,00
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Berita acara rekonsiliasi data penerimaan	BK	12 Berita Acara	108.908.000,00	APBD	-	12 Berita Acara	132.576.000,00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Perwako Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	BK	1 Perwako	125.000.000,00	APBD	-	1 Perwako	150.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen SP2D SKPD selain gaji	BK	2000 SP2D	329.887.060,00	APBD	-	2000 SP2D	396.000.000,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kualitas pelaporan keuangan daerah	BK	100%	2.500.288.408,00	APBD	-	100%	3.085.200.000,00
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BK	12 Laporan	110.000.000,00	APBD	-	12 Laporan	132.000.000,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Daerah	BK	28 SKPD	105.000.000,00	APBD	-	28 SKPD	126.000.000,00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1. Jumlah Informasi Keuangan Daerah yang disusun 2. Laporan Keuangan semester 1 3. Prognosis 6 bulan berikutnya	BK	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	189.013.408,00	APBD	-	12 Informasi 1 Laporan 1 Laporan	228.000.000,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berita Acara Konsolidasi Laporan Keuangan	BK	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	110.000.000,00	APBD	-	28 SKPD, 8 BLUD, 1 LKPD	132.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BK	1 Perda 1 Perwako	541.060.000,00	APBD	-	1 Perda 1 Perwako	660.000.000,00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Tindak Lanjut LHP BPK	BK	1 Dokumen	88.650.000,00	APBD	-	1 Dokumen	127.200.000,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TP-TGR	BK	80% TPTGR	110.000.000,00	APBD	-	80% TPTGR	132.000.000,00
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Prosedur Analisis LPP APBD	BK	1 Dokumen	77.200.000,00	APBD	-	1 Dokumen	126.000.000,00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perwako Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Gar APD	BK	1 Perwako	110.000.000,00	APBD	-	1 Perwako	132.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sisdur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BK	1 Dokumen	110.000.000,00	APBD	-	1 Dokumen	132.000.000,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan Keuangan yang disusun sesuai SAP	BK	6 Laporan	700.000.000,00	APBD	-	6 Laporan	840.000.000,00
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pembinaan BLUD	BK	8 BLUD	160.000.000,00	APBD	-	8 BLUD	192.000.000,00
5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyusunan Statistik KPD	BK	1 Dokumen	89.365.000,00	APBD	-	1 Dokumen	126.000.000,00
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	BK	100%	10.028.182.000,00	APBD	-	100%	12.033.818.400,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan analisis perencanaan	BK	2 laporan	28.182.000,00	APBD	-	2 laporan	33.818.400,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan mendesak tersedia	BK	1 Tahun	10.000.000.000,00	APBD	-	1 Tahun	12.000.000.000,00
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	BK	6 Bidang pengelolaan	260.000.000,00	APBD	-	6 Bidang pengelolaan	312.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	BK	6 Bidang pengelolaan	260.000.000,00	APBD	-	6 Bidang pengelolaan	312.000.000,00
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan BMD sesuai aturan	BK	100%	2.685.616.908,00	APBD	-	100%	3.306.757.200,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD sesuai aturan	BK	100%	2.685.616.908,00	APBD	-	100%	3.306.757.200,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Buku standar harga barang dan jasa yang disusun	BK	1 buku	119.790.000,00	APBD	-	1 buku	146.400.000,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1. Dokumen RKBMD 2. Dokumen RKPBMMD	BK	1 Buku 1 Buku	13.849.500,00	APBD	-	1 Buku 1 Buku	18.600.000,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoranya	BK	145 orang	1.439.885.204,00	APBD	-	145 orang	1.800.000.000,00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah data BMD yang diinventarisir	BK	28 laporan	157.258.000,00	APBD	-	28 laporan	192.000.000,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat balik nama yang diterbitkan	BK	10 sertifikat	50.000.000,00	APBD	-	10 sertifikat	60.000.000,00
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	1. Penilaian BMD dimanfaatkan 2. Penilaian BMD dipindahyangankan 3. Penilaian BMD belum tercatat	BK	3 Penilaian	75.000.000,00	APBD	-	3 Penilaian	90.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. BMD yang dipindatangkalan 2. BMD yang diawasi 3. BMD yang dapat dikendalikan	BK	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	249.999.204,00	APBD	-	2 Jenis 1 Laporan 1 Laporan	300.000.000,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Jumlah penetapan status pengguna barang milik daerah 2. Jumlah pengalihan status pengguna sementara barang milik daerah 3. Jumlah objek pemanfaatann aset 4. Jumlah HGB diatas HPL yang tertata	BK	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	110.000.000,00	APBD	-	29 penetapan status 50 unit rumah dinas, 5 sewa, 2 pinjam pakai 29 status pengalihan 76 HGB diatas HPL	132.000.000,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi Barang	BK	2 Kali	7.245.000,00	APBD	-	2 Kali	9.600.000,00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan	BK	4 laporan	62.590.000,00	APBD	-	4 laporan	78.157.200,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi/Bimtek/R ekonsiliasi Pengelolaan BMD	BK	3 Kali	400.000.000,00	APBD	-	3 Kali	480.000.000,00
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD	BK	100%	2.421.410.624,00	APBD	-	100%	2.972.341.200,00
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Realisasi PAD	BK	100%	2.421.410.624,00	APBD	-	100%	2.972.341.200,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Data Potensi Pajak	BK	4 Jenis Pajak	61.340.000,00	APBD	-	4 Jenis Pajak	73.608.000,00
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana Penunjang Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	BK	6 Jenis	640.275.000,00	APBD	-	6 Jenis	771.133.200,00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Objek Pajak Baru	BK	10 Objek	112.907.608,00	APBD	-	10 Objek	135.600.000,00
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Pajak Online Terintegrasi	BK	10 Data Online	14.603.000,00	APBD	-	10 Data Online	18.000.000,00
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Termutakhirkan Data PBB P2	BK	7500 Objek PBB P2	223.530.000,00	APBD	-	7500 Objek PBB P2	268.608.000,00
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Pajak yang Ditetapkan	BK	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SK PDKBT/SKPDN	172.368.408,00	APBD	-	3000 SPPT, 1500 SKPD, 100 SKPDKB/SKPDN	218.280.000,00
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Penagihan Pajak	BK	1 Laporan	998.960.408,00	APBD	-	1 Laporan	1.200.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Berita Acara Pemeriksaan	BK	10 Berita Acara	197.426.200,00	APBD	-	10 Berita Acara	287.112.000,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BK	A	13.456.859.991,00	APBD	-	A	16.753.284.000,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	BK	100%	22.039.950,00	APBD	-	100%	33.000.000,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja yang dihasilkan	BK	2 Dokumen	22.039.950,00	APBD	-	2 Dokumen	33.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	11.731.870.846,00	APBD	-	100%	14.400.000.000,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN dibayarkan	BK	78 orang	11.731.870.846,00	APBD	-	78 orang	14.400.000.000,00
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	213.740.000,00	APBD	-	100%	320.088.000,00
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	BK	5 orang	213.740.000,00	APBD	-	5 orang	320.088.000,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	0,00	APBD	-	100%	73.080.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	BK		0,00	APBD	-	87 stel	73.080.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	478.119.195,00	APBD	-	100%	712.200.000,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor tersedia	BK	3 Jenis	2.742.000,00	APBD	-	3 Jenis	4.200.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	BK	46 jenis;	29.436.000,00	APBD	-	46 jenis;	60.000.000,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Karcis, Bill, Blanko, STS, TTUK dan surat pengujian tercetak 2. Barang cetakan keperluan kantor tercetak 3. Fotocopy dan penjiilidan terbayarkan	BK	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	264.831.195,00	APBD	-	8 Jenis 12 Bulan 70.000 Lembar	318.000.000,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Snack tamu 2. Makanan ringan pimpinan 3. Makan dan minum	BK	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	24.970.000,00	APBD	-	500 Porsi 12 Bulan 60 Hari	30.000.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Perjalanan dinas terlaksana 2. Makanan dan minuman rapat dan lembur tersedia	BK	12 Bulan 12 Bualn	156.140.000,00	APBD	-	12 Bulan 12 Bualn	300.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	166.750.000,00	APBD	-	100%	204.000.000,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kursi eselon III, Kursi eselon IV, kursi rapat, meja eselon III, lemari/rak arsip tersedia	BK	1 paket	56.800.000,00	APBD	-	1 paket	72.000.000,00
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, komputer, CCTV	BK	3 unit, 5 unit, 1 set	109.950.000,00	APBD	-	3 unit, 5 unit, 1 set	132.000.000,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal		100%	144.140.000,00	APBD	-	100%	182.400.000,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai tersedia 2. Paket pengiriman tersedia	BK	150 lembar 1 Tahun	1.660.000,00	APBD	-	150 lembar 1 Tahun	2.400.000,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, telp, air, fax/internet, TV kabel terbayarkan	BK	12 Bulan	142.480.000,00	APBD	-	12 Bulan	180.000.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas pelayanan internal	BK	100%	700.200.000,00	APBD	-	100%	828.516.000,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas yang disediakan pemeliharaannya	BK	1 unit	42.430.000,00	APBD	-	1 unit	50.916.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi Detail 1	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan operasional yang disediakan pemeliharannya	BK	39 unit	263.200.000,00	APBD	-	39 unit	291.600.000,00
5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Laptop, komputer, printer dan peralatan kantor lainnya terpelihara	BK	30 unit	17.760.000,00	APBD	-	30 unit	24.000.000,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset dan mesin perforasi	BK	2 unit	15.950.000,00	APBD	-	2 unit	28.800.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Alat kebersihan dan bahan pembersih tersedia 2. Jasa cleaning service tersedia 3. Retribusi sampah terbayarkan 4. Jumlah gedung kantor yang dipelihara	BK	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	360.860.000,00	APBD	-	14 jenis 4 orang 12 bulan 1 gedung	433.200.000,00

BAB IV

PENUTUP

Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 akan berakhir pada tahun 2021, sedangkan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2022-2026 baru akan disusun setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik pada 17 Februari 2021, maka penyusunan Rancangan awal Renja Tahun 2022 ini mempedomani Evaluasi terhadap capaian Renstra SKPD Tahun 2016-2021 dan Rancangan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bukittinggi. Substansi yang disusun dalam Renja Tahun 2022 nantinya akan diintegrasikan kedalam Renstra SKPD Tahun 2022-2026 yang akan mulai disusun setelah pelantikan Kepala Daerah Terpilih.

Selain itu, Renja Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022.

Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternative sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun;
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Agustus 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI



HERRIMAN, SH.M. Hum.
NIP.19680525 199308 1 001